

# **LAPORAN PENELITIAN**

**KELESTARIAN SISTEM PERKAWINAN ADAT PASEMAH  
S E T E L A H  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**O L E H**

**HASMONEI, SH**

**PAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TERBUKA  
DESEMBER 1991**

## R I N G K A S A N

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan untuk mengetahui tentang keberlakuan, karakteristik, keputusan dan kelestarian sistem perkawinan Adat Pasemah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Alat pengumpulan data yaitu kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Kuisisioner dan wawancara adalah untuk mengumpulkan data primer yang berhubungan dengan sistem perkawinan adat Pasemah itu sendiri sedangkan dokumentasi adalah untuk menelaah, menginterpretasikan data dan sebagai alat kontrol data yang didapat di lapangan.

Dalam upaya untuk menarik kesimpulan, metodologi yang digunakan adalah distributif frekuensi dilengkapi dengan analisis secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan bahwa Sistem Perkawinan Adat Pasemah walaupun mengalami pergeseran-pergeseran tetapi masih berlaku sampai sekarang. Sebagai suatu sistem ternyata tata cara-tata cara yang ada dalam perkawinan adat Pasemah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mempunyai keputusan yang berbeda-beda. Selanjutnya dikarenakan tidak ada alasan untuk mempertentangkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan sistem perkawinan adat Pasemah, bahkan di dalam kedua hukum tersebut ditemukan banyak keserasian. Dengan demikian sepanjang masyarakatnya masih menghendaki maka sistem perkawinan adat Pasemah akan tetap lestari.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmatNya laporan penelitian ini dapat disusun sebagai hasil kegiatan penelitian selama empat bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 1991.

Penelitian ini merupakan hal yang penting, karena dapat menghasilkan banyak manfaat, baik bagi pihak-pihak yang ada hubungannya dengan obyek penelitian maupun bagi peneliti sendiri. Namun demikian dalam melaksanakan penelitian ternyata terdapat beberapa langkah yang tidak persis sama dengan rencana yang disusun dalam proposal. Untuk itu dengan rendah hati peneliti aturkan maaf ke pada semua pihak.

Dengan terlaksana dan tersusunnya laporan penelitian, pada kesempatan yang baik ini disampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Terbuka,
2. Bapak Pembantu Rektor I/Ketua TPUP,
3. Bapak Kepala Puslitabmas/Sekretaris TPUP,
4. Bapak Kepala UPBJJ Bengkulu,
5. Bapak Merry Yono, SH sebagai pembimbing,
6. Pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu semua saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan rendah hati dan lapang dada demi perbaikan penelitian di masa-masa yang akan datang.

Bengkulu, Desember 1991

Hormat Peneliti,

Hasmonel, SH

## D A F T A R   I S I

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sistem Perkawinan .....	5
B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	7
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian .....	15
B. Manfaat Penelitian .....	16
BAB IV. METODE PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel .....	18
1. Populasi .....	18
2. Sampel .....	19
B. Metode Pengumpulan Data .....	19
1. Penelitian Lapangan .....	19
2. Penelitian Kepustakaan .....	20
3. Langkah-langkah menyusun kuisioner .....	20
4. Langkah-langkah melakukan wawancara .....	21
C. Metode Analisis Data .....	21
1. Editing .....	21
2. Koding .....	22
3. Menghitung frekuensi dan tabulasi .....	22
4. Pengolahan Data .....	22

PAB	V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hambatan Penelitian .....	23
	B. Hasil Penelitian .....	24
	C. Pembahasan .....	37
PAB	VI. KESIMPULAN .....	46
	DAFTAR PUSTAKA .....	48
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin
- Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan umur
- Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan status
- Tabel 4. Asas-asas perkawinan adat Pasemah
- Tabel 5. Bentuk-bentuk perkawinan
- Tabel 6. Upacara sebelum perkawinan
- Tabel 7. Tata cara melaksanakan perkawinan.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Izin Mengadakan Penelitian
- Lampiran 2. Pengantar/daftar pertanyaan
- Lampiran 3. Personalia Tenaga Peneliti.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka pembinaan dan penyusunan hukum nasional, maka perlu adanya pengkajian dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku maupun hukum yang akan diberlakukan. Sebagai salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini, pembangunan hukum perlu pula diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum serta untuk mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Kebudayaan tradisional dan kesadaran hukum rakyat merupakan unsur yang mendasar dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh kedudukan atau status kebudayaan nasional yang umumnya merupakan hukum yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat. Hukum yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat inilah yang dinamakan hukum adat. Hukum adat yang masih dipertahankan itu salah satunya adalah Sistem Perkawinan Adat Pasemah.

Di dalam perkembangan hukumnya, Negara Republik Indonesia sekarang ini telah banyak mengalami kemajuan atau perubahan menuju kearah perbaikan dan penyempurnaan baik dilihat dari segi materinya maupun di lihat dari sudut formalnya.

namun di lihat dari keberadaan dan keberlakuan hukum adat, kondisi hukum positif, kelihatannya masih merupakan tahapan menuju hukum yang dicita-citakan. Anggapan ini timbul dikarenakan adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam perkawinan adat Pasemah kurang serasi dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kurang serasinya prinsip-prinsip tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa macam bentuk perkawinan yang terdapat dalam sistem perkawinan adat Pasemah, di mana masing-masing bentuk perkawinan mempunyai hak dan kewajiban suami isteri yang berbeda-beda.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam salah satu asas/prinsipnya menyatakan bahwa adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputus secara bersama-sama.

Sebelum Indonesia merdeka, hukum yang mengatur perkawinan bagi bangsa Indonesia asli adalah hukum adat. Hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, walaupun jarang sekali ada yang bertolak belakang akan tetapi kalau diperhatikan secara seksama ternyata ada perbedaan antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lainnya.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan tersebut

tetap berlaku, mengingat bangsa Indonesia pada waktu itu belum sempat menyusun/menciptakan undang-undang perkawinan baru yang sesuai dengan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku sampai terbentuknya Undang-undang Perkawinan Nasional hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut, dikhawatirkan menghapus kekuatan berlakunya hukum perkawinan adat yang hanya berlaku bagi daerah-daerah tertentu saja. Namun demikian bila dikaji lebih lanjut ternyata Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan itu tidak/belum mengatur secara lengkap mengenai segala aspek yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Pengaturan yang tidak/belum lengkap inilah yang memungkinkan tetap berlakunya sistem atau tata cara perkawinan menurut hukum adat, khususnya yang menyangkut tata cara sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan bentuk-bentuk perkawinan yang digunakan.

Sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diberlakukan, di daerah Pasemah (Kaki Gunung Dempo) Kecamatan Pegar Alam jarang sekali bahkan belum pernah diadakan penelitian, apakah Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah berlaku secara penuh, baik yuridis, sosiologis maupun berlaku secara filosofis. Dengan kata lain apa-

kah Undang-Undang Perkawinan tersebut sesuai dengan kebutuhan sehingga dipertahankan keberlakuannya secara sadar demi pembangunan atau disebabkan oleh faktor-faktor lain.

### B. Perumusan Masalah.

Apabila kita hubungkan antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku secara nasional tetapi kurang lengkap sedang di lain pihak sistem perkawinan adat Pasemah mempunyai beberapa bentuk perkawinan, di mana bentuk-bentuk perkawinan tersebut masih tetap diakui, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem Perkawinan Adat Pasemah masih berlaku bagi masyarakat Pasemah ?
2. Bagaimana kedudukan sistem Perkawinan Adat Pasemah dihadapan Hukum Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ?
3. Bagaimana kelestarian berlakunya sistem Perkawinan Adat Pasemah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Sistem Perkawinan.

Pembahasan tentang pengertian Sistem Perkawinan Adat Pasemah akan diawali dengan membahas pengertian sistem terlebih dahulu. Dalam Kamus Bahasa Inggris yang berjudul *The American Heritage Dictionary of the English Language* disebut delapan arti tentang sistem. Salah satu dari pengertian sistem menurut kamus tersebut adalah : " A group of interacting, interrelated or interdependent elements forming or regarded as forming a collective entity ".

Dari penjelasan pengertian sistem yang dikutip di atas, Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo (1986) menyimpulkan bahwa suatu sistem itu terdiri dari atau dicirikan oleh adanya :

1. Hubungan dan saling ketergantungan di antara bagian-bagian atau elemen-elemen dalam sistem.
2. Merupakan suatu kesatuan (entity).

Dengan demikian, suatu sistem dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Hal ini dapat pula diartikan jika salah satu bagian dari sistem tidak berfungsi dengan baik, maka bagian-bagian lain akan terpengaruh sehingga sistem akan menjadi tidak berfungsi secara baik. Kemudian, suatu sistem itu biasa

nya bekerja dalam suatu lingkungan tersendiri dan terdapat batas-batas dengan sistem dari lingkungan yang lain.

Selanjutnya apabila kita hubungkan dengan Sistem Perkawinan Adat Pasemah, maka penulis membatasi bagian bagian yang saling berhubungan itu khusus mengenai pelaksanaan perkawinan yang terdiri dari :

1. Beghusik/begareh
2. Sewarian/pacaran
3. Tanangan
4. Beghuwas
5. Pernikahan/perkawinan.

Sebagai bahan pertimbangan, dapat pula kita simak pengertian sistem yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : Sekelompok bagian-bagian (alat-alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu maksud.

Dari kedua pengertian tersebut dikaitkan dengan batasan penulisan di atas maka dapatlah ditarik pengertian sistem perkawinan adat Pasemah secara sederhana yaitu : Hubungan yang saling berkaitan antara tata cara yang satu dengan tata cara lainnya yang di mulai dari masa pengenalan seorang gadis dengan seorang perjaka/bujang sampai menjadi suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah.

### 3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang berwibawa dan mempunyai pengaruh di mana pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dengan dipatuhi sepenuh hati (Terhaar, 1960).

Fungsionaris mempunyai tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan demikian hukum adat yang berlaku itu bukan hanya keputusan hakim tetapi juga keputusan adat, rapat desa, wali tanah dan petugas-petugas di kalangan agama. Keputusan ini juga berdasarkan kerukunan (musyawarah) yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan.

Oleh sebab itu, tidak berlebihan apabila Soerojo Wignjodipuro (1982) menyatakan bahwa hukum adat itu menjelmakan perasaan hukum yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia, lahir dan berkembang seiringa serta secepat perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri, masyarakat Indonesia yang memilih pandangan serta falsafah hidup Pancasila.

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis di antaranya hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa (Soepomo, 1983). Disebabkan oleh kekuatan mempertahankan hukum adat dalam pergaulan

---

hidup oleh masyarakat maupun oleh kekuatan hidup dari badan-badan persekutuan hukum itu sendiri, maka hukum adat itu maju kepada kehidupannya sendiri (Soepomo, 1982).

Hukum adat mempunyai dua unsur mutlak (Soerojo Wignjodipuro, 1982) yaitu :

1. Unsur kenyataan, bahwa hukum adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat,
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat yang dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum.

Kedua unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*Opinio necessitatis*).

Selanjutnya agar berfungsi, maka kaidah hukum pada umumnya maupun hukum perkawinan pada khususnya harus mempunyai tiga unsur kelakuan (Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo, 1986) yaitu :

1. Berlaku secara yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen) atau jikalau kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen, 1925).
2. Berlaku secara sosiologis, apabila kelakuan kaidah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaidah hukum tadi tertuju (Gustav Radbruch, 1932).
3. Berlaku secara filosofis, apabila kaidah hukum



tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (recgtidee) sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dengan demikian membina hukum nasional Indonesia, tidaklah hanya berarti menciptakan hukum yang baru yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi naluri kebangsaan sesuai dengan falsafah negara Pancasila.

Untuk itu, maka semua penciptaan hukum baru yang bertujuan untuk mendirikan suatu masyarakat Indonesia yang bersatu, hukum yang bersifat nasional, berdaulat kultural, adil dan makmur di bidang sosial ekonomi, tentulah perundang-undangan nasional yang baru itu harus sebanyak mungkin mengambil bahan-bahan dari hasil penelitian/penyelidikan hukum adat dan etnografi (Iman Sudiyat, 1978) termasuk pula dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan.

Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh K. Wantjik Saleh (1980) bahwa pembinaan hukum nasional diarahkan kepada unifikasi hukum dalam segala bidang yang memperhatikan ciri-ciri khas dan tingkat perkembangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah : Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Iman Sudiyat (1981) berpendapat bahwa

perkawinan itu adalah merupakan urusan keluarga, anak-anak melepaskan diri daripadanya segera atau beberapa waktu sesudah mereka kawin, jadi mereka meneruskan garis hidup (sosial) orang tuanya atau salah satu di antara orang tuanya. Sedang masyarakat, menganggap bahwa perkawinan itu bukan hanya bersifat lahiriah, yaitu sebagai suatu perjanjian tetapi lebih bersifat kemasyarakatan. Dalam hal ini Iman Sudiyat menyatakan, perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya di dalam tata hukum, perbuatan itu harus terang, karena itu harus disaksikan oleh masyarakat (Iman Sudiyat, 1978).

Perkawinan merupakan rangkaian upacara, seperti apa yang telah dikemukakan oleh Djojodiguno, bahwa perkawinan atau nikah itu tidak dirasakan sebagai perjanjian, melainkan sebagai salah satu upacara sahaja dalam rangka upacara inisiasi (pemasukan) dalam keadaan baru, sehingga menjadi orang yang penuh bernilai di dalam masyarakat (Djojodiguno, tanpa tahun).

Hukum adat perkawinan adalah suatu bentuk/sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang mempunyai perbedaan di satu daerah dengan daerah lain. Namun demikian perlu pula digali, dipelajari dan dimanfaatkan sebagai landasan penyusunan hukum nasional.

Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dituangkan dalam TAP MPR NO. 11/MPR/1988 dan Keppres No. 11/1974

secara inti menetapkan dua unsur pembinaan hukum nasional yaitu :

1. Pancasila sebagai landasan pembinaan hukum.
2. Pengarahan kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat.

Dengan bertitik tolak dari dua unsur pembinaan di atas, maka pada tahun 1974 bangsa Indonesia telah berhasil menciptakan/menyusun suatu Undang-Undang yang bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini berlaku secara nasional dan mengabdikan untuk kepentingan nasional. Dengan demikian akan dapat menghapus kekuatan berlakunya peraturan perkawinan yang berlaku di daerah-daerah tertentu saja, misalnya hukum perkawinan adat dan hukum yang berlaku bagi golongan tertentu seperti halnya Hukum Perkawinan Islam.

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara tegas mengaturnya dalam pasal 66 :

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengede Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur ten-

tang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku

Memperhatikan pasal 66 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut jelaslah bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang sedang berlaku saat ini menghapus segala peraturan tentang perkawinan sebelum dikeluarkan -kannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Namun demikian, setelah ditelaah lebih jauh ternyata Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut tidak mengatur secara lengkap tentang semua masalah perkawinan, oleh sebab itu masih memberikan kesempatan untuk menggunakan hukum lain. Hal ini dapat kita simak beberapa tanggapan ahli dibawah ini :

1. Djaran Saragih menyatakan, bahwa ketentuan-ketentuan lain yang sudah ada sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, masih tetap berlaku. Dengan kata lain ketentuan yang terdapat dalam hukum adat, sepanjang belum diatur dinyatakan tetap berlaku.
  2. Abdurrahman dalam bukunya : Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, yang dinyatakan tidak berlaku itu adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang baru dan dijadikan standard untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk, sehingga secara otomatis pembaharuan di lapangan hukum perkawinan dengan peraturan tersebut di atas bukan hanya sekedar merombak sistem per-
-

kawinan yang berlaku di negara kita, jadi hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru masih dapat dipakai termasuk hukum adat.

3. Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya : Hukum Perkawinan Adat (1983), lebih tegas lagi, bahwa pada kenyataannya sampai saat ini hukum adat mengenai perkawinan masih tetap berlaku di kalangan masyarakat adat, malahan di sana sini terlihat kecenderungan kembali ke bentuk lain.

Disamping beberapa tanggapan para ahli, ternyata beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan masih memberikan peluang untuk menggunakan hukum lain. Pasal-pasal tersebut adalah :

1. Pasal 2 ayat 1, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Pasal 6 ayat 6, ketentuan tersebut pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
3. Pasal 8 huruf f, Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
4. Pasal 10, Apabila suami dan isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka

tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

5. Pasal 37, Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

### BAB III

#### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

##### A. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dan untuk mengetahui, apakah Sistem Perkawinan Adat Pasemah masih berlaku bagi masyarakat Pasemah.
2. Untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari:
  - a. Asas/prinsip perkawinan adat Pasemah
  - b. Bentuk-bentuk perkawinan adat Pasemah
  - c. Tata cara sebelum melaksanakan perkawinan menurut adat Pasemah
  - d. Tata cara melaksanakan perkawinan adat Pasemah.
  - e. Perilaku pribadi bagi yang melaksanakan perkawinan menurut adat Pasemah
  - f. Perilaku kelompok bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan menurut adat Pasemah.
3. Untuk memperoleh data dan sekaligus mengetahui tentang bagaimana kedudukan sistem perkawinan adat Pasemah dihadapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
4. Untuk memperoleh data dan sekaligus mengetahui tentang bagaimana kelestarian sistem perkawinan adat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
5. Untuk membuktikan, apakah prinsip-prinsip yang di

memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional memang tidak serasi dengan prinsip-prinsip yang dimiliki/dikenal oleh adat Pasemah.

### B. Manfaat Penelitian.

1. Diharapkan dapat mengungkapkan secara objektif hukum atau peraturan yang benar-benar ditaati dan dipertahankan oleh masyarakat Pasemah baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.
2. Diharapkan dapat mengungkapkan secara objektif, apakah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu sudah berlaku baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis di tengah-tengah masyarakat adat Pasemah.
3. Apabila ternyata di dalam penelitian ini ditemukan asas-asas atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh sistem perkawinan adat Pasemah tidak sesuai dan atau kurang serasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk mencari jalan keluarnya dan memberikan pengarahan kepada masyarakat adat agar berangsur-angsur meninggalkan prinsip-prinsip tersebut. Sebaliknya pihak yang berwenang dapat pula memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat adat, agar mempertahankan dan mengembangkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang



Undang Nomor 1 tahun 1974.

4. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, untuk digunakan sebagai bekal bagi para ahli hukum untuk mengembangkan serta mempelajari dan mengkaji hukum adat yang benar-benar berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat.
5. Diharapkan dapat dijadikan bahan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan para penegak hukum untuk mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang benar-benar berlaku dimasyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## BAB IV METODE PENELITIAN

### A. Populasi dan Sampel.

#### 1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua individu untuk siapa fakta/kenyataan yang didapat dari sampel ini hendak digeneralisasikan. Dengan demikian populasi hipotetiknya adalah masyarakat hukum (adat) di daerah Pasemah (Kecamatan Pagar Alam dan sekitarnya) yang mengetahui tentang sistem perkawinan adat Pasemah, khususnya yang menyangkut prinsip-prinsip perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, tata cara sebelum perkawinan, dan tata cara melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan di dalam suatu perkawinan, yang terkait di dalamnya bukan hanya calon suami isteri, melainkan pula menjadi urusan dan tanggung jawab keluarga, Kepala Desa/Lurah, P3N, Pemuka Adat maka populasi induk penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama dan P3N di Kecamatan Pagar Alam.
2. Kepala-Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Pagar Alam
3. Mantan-Mantan Pasirah Pemerintahan Marga.
4. Pemuka-Pemuka adat.

5. Orang tua yang pernah melaksanakan hajad menikahkan anak atau anggota keluarga lainnya.

## 2. Sampel

Berdasarkan berbagai pertimbangan keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti baik dana, waktu maupun sarana, maka penarikan sampel penelitian ini menggunakan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel secara sengaja dan dianggap mewakili populasi yang ada. Sampel penelitian secara sengaja diambil dari populasi induk sebanyak 100 responden yang terdiri dari:

1. 10 responden, diambil dari Kepala-Kepala Desa/lurah.
2. 20 responden, diambil dari Pegawai KUA dan PKN.
3. 20 responden, diambil dari Pemuka-Pemuka adat.
4. 20 responden, diambil dari mantan Pasirah Pemerintahan Marga.
5. 30 responden, diambil dari orang tua yang pernah menikahkan anak/anggota keluarga lainnya.

## 3. Metode Pengumpulan Data.

Di dalam upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan, digunakan untuk pengumpulan data primer yaitu dengan cara:
  - a. Membagikan daftar pertanyaan/kuisisioner langsung kepada responden. Pemakaian kuisisioner adalah untuk mengumpulkan data-data mengenai keadaan

sistem perkawinan adat Pasemah sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

- b. Wawancara, cara ini dilakukan adalah untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang sistem yang berlaku dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari daftar pertanyaan.
2. Penelitian Kepustakaan, digunakan untuk pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara mengadakan pengkajian terhadap buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. Data ini berfungsi sebagai alat pembandingan dan sebagai alat kontrol data yang didapat di lapangan.
  3. Proses/langkah-langkah menyusun kuisioner.
    - a. Pertama-tama diadakan diskusi dengan pembimbing dan para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian. Diskusi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, saran-saran sehingga ditemukan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan sesuai dengan objek penelitian.
    - b. Langkah kedua yaitu melakukan uji coba dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun. Uji coba ini digunakan adalah untuk mengetahui apakah semua pertanyaan yang ada dalam daftar mudah oleh responden. Jumlah responden untuk uji sebanyak lima orang, diambil dari anggota populasi di luar sampel penelitian yang sebenarnya.

#### 4. Proses/langkah-langkah melakukan wawancara.

- a. Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan teknik wawancara berstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada kuisioner.
- b. Wawancara tidak dilakukan secara langsung tetapi didahului dengan mengadakan pendekatan secara pribadi melalui obrolan-obrolan ringan.
- c. Melakukan uji coba kepada dua orang responden yang diambil dari anggota populasi di luar sampel penelitian yang sebenarnya dan di luar responden untuk uji coba.

#### 5. Metode Analisis Data.

Analisis diarahkan agar mampu memberikan hasil yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Data yang telah dikumpulkan belum dapat digunakan langsung untuk membuat suatu kesimpulan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

##### 1. Editing

Pertama-tama yang dilakukan adalah meneliti kembali apakah data yang terkumpul itu cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Editing ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan (reliability) data yang hendak diolah dan dianalisa. Hal-hal yang diteliti dalam editing ini antara lain: kelengkapan pengisian, keterbacaan tulisan, relevansi jawaban, konsistensi dan kejelasan makna jawaban serta keseragaman satuan data.

## 2. Koding

Yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut macamnya. Pengklasifikasian jawaban ditandai dengan cara memberi kode pada masing-masing jawaban.

## 3. Menghitung frekuensi dan tabulasi.

Dalam menghitung frekuensi, digunakan cara tallying yaitu dengan mengambil dan memasukan setiap jawaban yang telah berkode ke dalam kategori yang bersangkutan. Pemasukan jawaban dilakukan secara simbolik yakni mencoretkan tanda pada kolom yang telah disediakan untuk kategori yang bersangkutan. Kemudian data tersebut disusun kembali dalam bentuk tabel.

## 4. Pengolahan data.

Data yang diperoleh setelah dibuat dalam bentuk tabel, dan diklasifikasikan kemudian dijabarkan kembali dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode induktif, mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan untuk menggambarkan keadaan populasi.
- b. Metode Deduktif, mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik untuk membahas obyek penelitian.
- c. Metode komparatif, untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam hasil penelitian dengan mengadakan perbandingan antara data primer dan data sekunder.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hambatan Penelitian.

Pada mulanya peneliti cenderung untuk bertahan mencari sampel sesuai dengan rencana, akan tetapi di lapangan ditemukan beberapa hambatan sehingga terpaksa dilakukan beberapa perubahan jumlah sampel berdasarkan status. Hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Budaya masyarakat Pasemah, laki-laki lebih dominan dalam segala bidang, khususnya dalam bidang perkawinan, sehingga sangat sulit mencari perempuan yang benar-benar mengetahui masalah perkawinan adat secara mendalam. Oleh karena itu terpaksa jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan (8,24 %) jauh lebih sedikit dari jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki (91,76 %).
2. Responden yang berstatus mantan Pasirah (Kepala Pemerintahan Marga) yang direncanakan sebanyak dua puluh orang, ternyata saat ini banyak yang telah meninggal dunia sehingga hanya sembilan orang yang berhasil ditemui. Untuk mengatasi masalah ini maka diambil kebijaksanaan memperbanyak responden yang berstatus Kepala Desa/Lurah. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan antara lain bidang tugas Pasirah dulu sama dengan bidang tugas Kepala Desa/

Lurah dan relatif sudah dilakukan oleh karena lokasi penelitian mengalami pemekaran/pengembangan dari kota kecamatan menjadi kota administratif.

### 3. Hasil Penelitian.

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian yang terdiri dari lima kelompok yaitu:

1. Latar belakang responden.
2. Tentang asas-asas/prinsip-prinsip yang dianut dalam perkawinan adat Pasemah.
3. Tentang bentuk-bentuk perkawinan.
4. Tentang upacara sebelum perkawinan.
5. Tentang tata cara melaksanakan perkawinan.

Dari seratus eksemplar kuisioner yang disebarkan kepada responden, ternyata yang berhasil ditarik kembali sebanyak delapan puluh sembilan kuisioner. Dari delapan puluh sembilan kuisioner tersebut terdapat beberapa jawaban yang baik berupa cek list maupun yang berupa uraian tidak sinkron bahkan bertolak belakang, maka terpaksa empat eksemplar tidak dapat digunakan sebagai data primer.

Hasil penelitian sistem perkawinan adat Pasemah ini dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	78	91,76
2.	Perempuan	7	8,24



Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	40 - 45 tahun	11	12,94
2	46 - 50 tahun	24	28,24
3	51 - 55 tahun	29	34,12
4	56 - ke atas	21	24,70
	T o t a l	85	100,00

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan status

No	Status	Frekuensi	Persentase
1	Kepala KUA	1	1,18
2	P3N	12	14,12
3	Lurah/kepala Desa	16	18,82
4	Mantan Pasirah	9	10,59
5	Pemuka adat	21	24,70
6	Orang tua yang menikahkan anak atau anggota keluarga lainnya	26	30,59
	T o t a l	85	100,00

Selanjutnya hasil penelitian asas-asas/prinsip-prinsip perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, tata cara sebelum perkawinan dan tata cara melaksanakan perkawinan menurut adat Pasenah akan dilaporkan masing masing dalam satu bentuk tabel.

Tabel 1. Asas-asas perkawinan

No	Pertanyaan	ada /ya	%	ti dak	%	tdk tahu	%
1	Apakah adat Pasemah memiliki asas-asas/prinsip perkawinan.	77	90,59	-	-	8	9,41
2	Keharusan mematuhi prinsip perkawinan.	77	90,59	-	-	8	9,41
3	Apakah prinsip-prinsip tersebut masih dipatuhi masyarakat	77	90,59	-	-	8	9,41
4	Apakah prinsip perkawinan mengalami perubahan	85	100	-	-	-	-
5	Apakah prinsip perkawinan tersebut pernah menghambat suatu perkawinan.	-	-	85	100	-	-

Dari jawaban-jawaban responden dalam bentuk terurai tentang asas-asas/prinsip-prinsip perkawinan adat Pasemah, maka dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Calon suami isteri dilarang kawin apabila berasal dari satu sumbai (Jurai/klen/marga/ akan tetapi prinsip ini berangsur-angsur mengalami perubahan disebabkan hubungan famili/kekerabatan dalam satu sumbai semakin lama semakin jauh.
2. Calon suami isteri tidak boleh berjumpa apabila sudah bertuangan. Asas ini dimaksudkan untuk men

cegah sesuatu yang tidak diinginkan, supaya kesucian perkawinan tetap terjaga. Asas ini pun mengalami perubahan dikarenakan perkembangan masyarakat adat Pasemah itu sendiri tidak memungkinkan lagi.

3. Janji nunggu kate betaruh.

Asas ini berlaku pula untuk masalah-masalah di luar perkawinan, di mana setiap orang Pasemah dituntut untuk menepati janji walaupun hanya diucapkan secara lisan (tidak tertulis).

4. Poligami adalah perbuatan tercela.

Tindakan berpoligami (nganggau), bagi masyarakat adat Pasemah bukan saja mengurangi harkat martabat di hadapan keluarga isteri tetapi juga di hadapan masyarakat adat umumnya.

Tabel 5. Bentuk-bentuk perkawinan

No	Pertanyaan	ada /ya	%	ti dak	%	tdk tahu	%
1	Apakah adat Pasemah mengenal bentuk-bentuk perkawinan.	85	100	-	-	-	-
2	Apakah bentuk-bentuk perkawinan itu masih diakui keberadaannya.	85	100	-	-	-	-
3	Apakah bentuk-bentuk perkawinan itu sekarang ini masih digunakan.	85	100	-	-	-	-

rial ini mempelai perempuan tidak dianggap hilang oleh keluarga asal dan hubungan famili/kekerabatan-nyapun tidak diputus.

4. Ambik anak lengit/duduk batu berdiri kayu.

Yaitu suatu bentuk perkawinan di mana mempelai laki-laki untuk selamanya ikut dan bertempat tinggal di lingkungan keluarga isteri. Pada perkawinan ambik anak lengit ini suami dianggap lengit (hilang) dari keluarga asalnya. Selanjutnya hak dan kewajiban terhadap keluarga asal menjadi hilang pula. Keturunan sebagai hasil perkawinan pada keluarga ini mengikuti garis keturunan ibu.

5. Ambik anak penantian/semendean.

Yaitu suatu bentuk perkawinan di mana mempelai laki-laki atas permintaan pihak keluarga mempelai perempuan dengan alasan/syarat tertentu, untuk sementara harus tinggal di lingkungan keluarga isteri. Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi maka bentuk perkawinan berubah menjadi semendean. Syarat-syarat atau alasan yang sering diajukan antara lain:

- a. Harus menunggu sampai adanya saudara laki-laki dari isteri yang berumah tangga, sebagai penerus.
- b. Harus menunggu, oleh karena saudara laki-laki dari isteri sedang ambik anak sementara pula.
- c. Menunggu sampai orang tua isteri kembali ke desa oleh karena sedang bertempat tinggal di tempat lain misalnya di ladang, di sawah atau di kebun.

Tabel 6. Upacara sebelum perkawinan

No	Pertanyaan	ada /ya	%	tdk ada	%	Tdk tahu	%
1	Apakah adat Pasemah memiliki tata cara sebelum perkawinan.	85	100	-	-	-	-
2	Apakah menurut adat tata cara tersebut harus dipatuhi.	4	4,7	81	95,3	-	-
3	Apakah tatacara itu masih di ikuti sampai sekarang	4	4,7	81	95,3	-	-
4	Apakah di dalam tata cara ini membicarakan pula masalah bentuk perkawinan.	85	100	-	-	-	-
5	Apakah calon mempelai ikut menentukan bentuk perkawinan yang akan dipakai	85	100	-	-	-	-

Berdasarkan jawaban-jawaban responden dalam bentuk terurai, urutan tata cara sebelum melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Beghusik/begareh.

Merupakan tahapan yang paling awal di mana seorang perjaka/laki-laki berkenalan dengan seorang gadis/perempuan. Beghusik atau begareh ini hanya dilakukan apabila sang perjaka/laki-laki tidak bertempat tinggal satu desa/dusun dengan si gadis/perempuan. Beghusik/begareh ini tidak boleh dilakukan secara

langsung akan tetapi larus seizin dan diantar oleh ketua bujang-gadis di mana gadis bertempat tinggal.

## 2. Sewarian/pacaran.

Apabila dalam acara begusik/begareh tadi ternyata kedua belah pihak sama-sama tertarik/simpati, maka dilanjutkan dalam bentuk yang lebih akrab lagi yaitu sewarian/pacaran. Pada tahap ini sang gadis dan perjaka sudah mempunyai hubungan secara pribadi yang biasanya di ikuti dengan pertemuan-pertemuan rutin. Hubungan secara pribadi ini minimal harus diketahui oleh ibu si gadis sebab dalam melakukan pertemuan biasanya ibu si gadislah yang mendampingi atau paling tidak bibinya si gadis.

## 3. Tunangan/Nueghi rasan

Apabila dalam masa pacaran ternyata si perjaka dan si gadis sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, maka si perjaka harus melapor kepada orang tuanya tentang hubungan dan rencana dengan si gadis. Laporan si perjaka, biasanya tidak langsung dipercaya begitu saja dan untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan tersebut orang tua si perjaka mengirimkan wakil tidak resmi ke rumah orang tua si gadis. Kedatangan wakil tidak resmi ini bisa dilakukan secara terang-terangan dan bisa pula dilakukan secara diam-diam. Hal ini tergantung kesepakatan antara si gadis dan perjaka.

Selanjutnya apabila ternyata si gadis dan perjaka

terbukti ada hubungan yang serius maka secara resmi orang tua perjaka mengirimkan utusan resmi sesuai dengan hasil yang dimusyawarahkan oleh wakil tidak resmi. Utusan resmi inilah yang dinamakan Nueghi rasan yang maksudnya adalah meresmikan hubungan si gadis dan perjaka dengan kata lain hubungan anak muda secara resmi diketahui dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak. Sesudah upacara Nueghi rasan tersebut maka resmilah si gadis dan si perjaka bertunangan. Pada tahap ini masalah-masalah yang biasa dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, antara lain tentang pelaksanaan perkawinan, perayaan perkawinan, bentuk perkawinan yang akan digunakan, penentuan hari beghawas dan lain-lain.

#### 4. Beghawas/penentuan hari perkawinan.

Tahap ini adalah tahap akhir dari tata cara sebelum perkawinan. Masalah-masalah yang dimusyawarahkan pada acara beghawas ini antara lain:

- a. Mencari hari baik bulan baik untuk melaksanakan perkawinan, perayaan perkawinan dan lain-lain.
- b. Penentuan hari penjemputan calon mempelai untuk persiapan pernikahan. Bila pernikahannya dilaksanakan di rumah calon mempelai laki-laki, maka calon mempelai perempuan yang dijemput, sebaliknya bila pernikahannya dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan, maka calon mempelai laki-laki yang dijemput.

sipasi masalah-masalah yang sifatnya intern keluarga terutama masalah dana perayaan perkawinan.

## 2. Mengumpulkan masyarakat adat (Pembentukan panitia).

Oleh karena peristiwa perkawinan ini merupakan pula tanggung jawab masyarakat adat, maka dengan sendirinya pelaksanaan upacara perkawinan pun menjadi tanggung jawab masyarakat. Pada saat mengumpulkan masyarakat adat biasanya yang dibahas adalah masalah-masalah yang bersifat teknis, mulai dari persiapan sampai berakhirnya perayaan, antara lain :

- a. Petugas yang menjemput mempelai
- b. Tempat menginap calon mempelai dan rombongan
- c. Tempat menyambut keluarga mempelai (besan)
- d. Petugas pendamping dalam pernikahan
- e. Petugas yang bertindak sebagai MC/protokol
- f. Petugas penyambut tamu
- g. Pembaca kitab suci
- h. Petugas dapur
- i. Petugas keamanan
- j. Petugas hidangan dan lain-lain.

## 3. Melagbiko/menjemput mempelai.

Dalam melaksanakan penjemputan mempelai ini selalu didasarkan atas kesepakatan kedua keluarga pada waktu begawas (penentuan hari perkawinan). Bila acara pernikahannya disepakati di rumah keluarga calon mempelai perempuan, maka calon mempelai laki-laki lah yang dijemput. Begitu pula sebaliknya, bila acara



pernikahan disepakati di rumah keluarga calon mempelai laki-laki, maka calon mempelai perempuanlah yang dijemput oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki.

Jika calon mempelai laki-laki yang dijemput biasanya dikawal oleh tiga orang pendamping yang terdiri dari satu orang laki-laki/perjaka wakil dari keluarga, satu orang perjaka wakil dari masyarakat adat dan satu perempuan muda (gadis). Sedangkan pihak keluarga calon mempelai yang menjemput, biasanya terdiri dari tiga orang yaitu satu laki-laki dewasa wakil dari keluarga, satu pemuka adat dan satu orang perjaka.

Jika calon mempelai perempuan yang dijemput biasanya dikawal pula oleh tiga orang pendamping yang terdiri dari satu orang gadis wakil dari keluarga, satu orang gadis wakil dari masyarakat adat dan satu orang perempuan yang sudah baya/berpengalaman mengenai tata cara perkawinan adat. Sedangkan pihak keluarga calon mempelai yang bertugas menjemput biasanya terdiri dari empat orang yaitu satu orang pemuka adat, satu orang laki-laki dewasa wakil dari keluarga mempelai, satu orang perempuan baya yang berpengalaman dan satu orang gadis wakil dari pihak keluarga mempelai laki-laki.

#### 4. Akad Nikah dan perayaan pernikahan/perkawinan.

Dalam melaksanakan akad nikah, adat Pasemah secara

peruh/utuh mengikuti tata cara yang ditentukan oleh agama yang dianut calon mempelai. Sedangkan perayaan pernikahan, biasanya dilakukan pada hari yang sama dengan akad nikah atau satu hari setelah akad nikah. Dalam hal perayaan, adat Pasemah juga tidak mengaturnya secara khusus, dengan kata lain semuanya diserahkan kepada kemampuan keluarga.

#### 5. Beghulang.

Setelah selesai acara akad nikah dan perayaan pernikahan di rumah mempelai yang menjemput, maka tibalah waktunya pulang ke rumah keluarga mempelai yang dijemput. Pulang ke rumah keluarga mempelai yang dijemput inilah yang dinamakan beghulang.

Pada acara beghulang di tempat/rumah keluarga besar ini, biasanya diadakan pula perayaan sebagaimana yang dilakukan di tempat pernikahan kedua mempelai. Selesai beghulang, maka selesailah semua tahapan tata cara perkawinan menurut adat Pasemah. Dan untuk selanjutnya kedua mempelai siap memasuki dan menjalani kehidupan baru sesuai dengan yang sudah direncanakan.

#### C. Pembahasan:

Pembahasan terhadap hasil penelitian dilakukan dengan cara menggeneralisasikan data dari obyek yang diteliti sehingga diperoleh kecenderungan-kecenderungan yang mengarah pada kenyataan yang sebenarnya.

Pada tabel 1, menunjukkan bahwa laki-laki merupakan mayoritas responden yang terpilih (81,76 %) sedangkan wanita hanya 8,24 %. Hal ini erat hubungannya dengan budaya masyarakat Pasemah di mana laki-laki lebih dominan dalam segala bidang, khususnya dalam bidang perkawinan. Namun demikian sekecil apapun peran perempuan, tetapi tetap dibutuhkan. Ini terbukti di mana dalam melaksanakan tata-cara tata cara perkawinan adat Pasemah, ada yang harus dikerjakan oleh perempuan. Akibat dari budaya tersebut, maka sedikit sekali dari perempuan-perempuan di daerah Pasemah yang mengetahui seluk beluk perkawinan adat Pasemah secara mendalam.

Pada tabel 2 dan tabel 3, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok usia dan jabatan/status terwakili secara seimbang. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini terwakili secara seimbang pula. Populasi yang seimbang cenderung akan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Pada tabel 4, didapatkan 90,59 % responden menyatakan bahwa adat Pasemah memiliki asas-asas/prinsip dasar perkawinan. Menurut adat Pasemah prinsip-prinsip itu harus dipatuhi oleh masyarakat adat Pasemah dan kenyataannya masih dipatuhi sampai kini. Sedangkan 9,41 % sisanya menyatakan tidak tahu apakah perkawinan adat Pasemah itu mengenal/memiliki asas-asas/prinsip-prinsip perkawinan atau tidak. Hal ini bisa disebabkan karena responden tidak dapat membedakan mana yang di

maksud prinsip perkawinan dan mana yang bukan prinsip/asas perkawinan. Analisa ini ada kaitannya dengan 100% responden menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut mengalami perubahan/pergeseran-pergeseran. Perubahan/pergeseran tersebut disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan lama (adat dulu) tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan masyarakatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua responden mengetahui adanya perubahan yang terjadi akan tetapi ada beberapa responden (9,41 %) tidak bisa memilah-milahkan mana yang menjadi prinsip/asas perkawinan dan mana yang bukan prinsip/asas perkawinan adat.

Dari kenyataan di atas terlihat bukti yang cukup meyakinkan bahwa perkawinan adat Pasemah ini benar-benar tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini lebih dikuatkan lagi 100 % responden menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak pernah menghambat terjadinya perkawinan, sebab adatlah yang menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya dan bukan sebaliknya.

Selanjutnya apabila kita hubungkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk mempertentangkan asas-asas/prinsip yang dimiliki adat Pasemah dengan asas-asas/prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bahkan apabila kita kaji lebih lanjut maka prinsip-prinsip tersebut

dapat diserasikan sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan dan keharusan suami isteri telah masak jiwa yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serasi dengan prinsip tidak boleh bertemu setelah calon suami isteri bertunangan yang dikenal oleh adat Pasemah. Sebab dengan tidak boleh bertemunya calon suami isteri, maka kesucian, keluhuran dan keagungan mahligai perkawinan akan selalu dijaga. Menjaga kesucian, keluhuran dan keagungan mahligai perkawinan tersebut butuh kematangan jiwa dan raga, sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan perkawinan.
2. Prinsip mempersukar perceraian, hak dan kedudukan suami isteri seimbang yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan serasi dengan janji munggu kate betaruh. Walaupun janji hanya diucapkan akan tetapi adat Pasemah mewajibkan setiap yang berjanji untuk menepati.
3. Larangan-larangan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan serasi dengan larangan kawin satu sumbai yang ada dalam adat Pasemah.
4. Asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan serasi dengan Poligami (Nganggau/banyak bini) adalah perbustan tercela bagi adat Pasemah.

Pada tabel 5, 100 % responden menyatakan bahwa adat Pasemah mengenal/memiliki bentuk-bentuk perkawinan, yang mana bentuk-bentuk perkawinan tersebut masih

diakui dan digunakan sampai sekarang.

Dari kelima macam bentuk-bentuk perkawinan yang dikenal itu, 100 % responden menyatakan bahwa perkawinan semendeanlah yang paling banyak digunakan. Hal ini terbukti dari 2020 pernikahan yang terjadi dari bulan Januari 1989 sampai bulan November 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam, hanya dua perkawinan yang menggunakan bentuk perkawinan belaki dide belapik rial, satu perkawinan ambik anak lengit dan dua perkawinan ambik anak sementara (jika syarat sudah terpenuhi, bentuk perkawinan berubah menjadi semendean).

Apabila kita hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ternyata bentuk perkawinan yang paling sesuai adalah perkawinan aemendean. Hal ini disebabkan adanya kesamaan prinsip tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami isteri.

Ditinjau dari sifatnya, sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan lampiran 3 PMA Nomor 2 tahun 1990 pasal 9 ayat 1 tentang Daftar Pemeriksaan Nikah (Model MB) maka bentuk-bentuk perkawinan adat Pasemah dapat dikategorikan sebagai perjanjian tambahan. Di dalam lampiran tersebut sudah disediakan kolom yang bisa diisi sesuai kesepakatan kedua belah

pihak sebelum akad nikah dilaksanakan.

Dengan adanya lampiran 3 tersebut maka sangat sulit di temukan adanya indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat menghapus bentuk-bentuk perkawinan yang dimiliki adat Pasemah, justru dengan pasal 29 dan PMA Nomor 2 tahun 1991 itu bentuk-bentuk perkawinan adat Pasemah bisa dilestarikan.

Pada tabel 6, 100 % responden menyatakan bahwa adat Pasemah mengenal/memiliki tata cara sebelum melaksanakan perkawinan, akan tetapi hanya 4,7 % yang menyatakan bahwa tata cara tersebut harus dipatuhi dan masih dipatuhi sampai kini.

Responden yang menyatakan bahwa tata cara sebelum perkawinan tidak harus diikuti dan sekarang tidak diikuti lagi sebanyak 95,3 % umumnya berpendapat :

- a. Adat Pasemah tidak mewajibkan setiap anggota masyarakatnya mengikuti tata cara adat secara lengkap, dengan kata lain apabila tidak mampu boleh dilaksanakan sebagian sesuai kemampuan masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan.
- b. Tata cara sebelum melaksanakan perkawinan ternyata tidak praktis, sebab apabila harus diikuti secara lengkap sering kali akan menghambat pelaksanaan perkawinan dikarenakan banyak menggunakan waktu, biaya dan tenaga.

Pada tabel 7, 100 % responden menyatakan bahwa adat Pasemah mengenal/memiliki tata cara melaksanakan

perkawinan, di mana tata cara tersebut masih hidup dan diikuti sampai sekarang, terutama oleh masyarakat adat Pasemah yang bertempat tinggal di Kecamatan Pagar Alam. Tata cara melangsungkan perkawinan ini termasuk yang terpenting dari semua rangkaian tata cara yang ada. Di samping lebih banyak dipengaruhi oleh agama yang di peluk, adatpun mewajibkan masyarakatnya melaksanakan tata cara melangsungkan perkawinan ini secara lengkap.

Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ternyata diatur secara jelas dalam pasal 2 ayat 1: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, dalam melaksanakan dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyerahkan sepenuhnya kepada agama dan kepercayaan yang dimiliki calon mempelai. Adat Pasemah dalam melaksanakan perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidaklah membuat hukum baru bagi masyarakat adat Pasemah yang akan melangsungkan perkawinan, melainkan memperkuat hukum yang telah berlaku di masyarakat.

Selanjutnya tentang pencatatan perkawinan, 100 % responden menyatakan, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sebelum dihapusnya Pemerintahan Negeri tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat oleh Keatib dusun di tempat melangsungkan perkawinan.



Khatib dusun ini diangkat dan diberhentikan oleh Pasirah sebagai Kepala Pemerintahan Marga.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1/1974 dan PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka setiap perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa mengenai pencatatan perkawinan hanya terjadi pemindahan lembaga tempat pencatatan perkawinan saja. Selangkan pembantu pegawai pencatat nikah bisa terjadi orangnya sama, sebab banyak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berasal dari Pegawai Pemerintahan Marga.

Dari hasil penelitian dan pembahasan jelas sekali terlihat bahwa tata cara-tata cara yang dikenal oleh perkawinan adat Pasemah tidak mempunyai akibat hukum kecuali tata cara pelaksanaan perkawinan. Apabila tata cara pelaksanaan perkawinan maka bisa berakibat batal atau tidak sahnya suatu perkawinan.

Dalam hal menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, baik adat Pasemah maupun Undang-Undang Perkawinan Nasional kedua-duanya bertumpu pada ketentuan agama. Dengan demikian, sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa tata cara, ternyata dihadapan Undang-Undang Perkawinan Nasional mempunyai kedudukan yang berbeda beda, yaitu:

1. Bentuk-bentuk perkawinan, dilihat dari sifatnya adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yang disebut juga perjanjian. Berhubung di dalam Daftar

Pemeriksaan Nisak yang bisa diisi untuk bentuk-bentuk Perkawinan adalah kolom perjanjian tambahan, maka kedudukan bentuk-bentuk perkawinan disadapan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tentu sebagai perjanjian tambahan

2. Tata cara sebelum melaksanakan perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ternyata tidak disinggung sama sekali sehingga kedudukannya hanyalah sebagai peristiwa budaya belaka.

3. Asas-asas perkawinan dan Tata cara perkawinan.

Asas-asas perkawinan adat Pasemah dan asas/prinsip prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mempunyai banyak keserasian. Kemudian dalam hal tata cara perkawinan, baik adat Pasemah maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kedua-duanya menunjuk ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing calon suami isteri. Dengan demikian asas-asas perkawinan adat dan tata cara perkawinan adat Pasemah kedudukannya sudah terserap kedalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

## BAB VI K E S I M P U L A N

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Perkawinan Adat Pasemah, pada kenyataannya walaupun mengalami pergeseran-pergeseran tetapi masih berlaku sampai sekarang ini. Asas-asas perkawinan dan tata cara melangsungkan perkawinan, keberlakuannya bersifat wajib sedangkan bentuk-bentuk perkawinan dan tata cara sebelum melangsungkan perkawinan keberlakuannya bersifat mengatur.
2. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa tata cara, ternyata tata cara-tata cara tersebut dihadapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, yaitu :
  - a. Bentuk-bentuk perkawinan adat Pasemah kedudukannya adalah sebagai perjanjian tambahan.
  - b. Tata cara sebelum melangsungkan perkawinan adat Pasemah, kedudukannya adalah sebagai peristiwa budaya.
  - c. Asas-asas perkawinan dan tata cara melangsungkan perkawinan adat Pasemah, kedudukannya sudah terserap ke dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

3. Sistem Perkawinan Adat Pasemah, sepanjang masyarakatnya menghendaki maka masih akan tetap lestari, di karenakan :

- a. Tidak ada alasan untuk mempertentangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan sistem perkawinan adat Pasemah.
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mempunyai banyak keserasian dengan sistem perkawinan adat Pasemah. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut benar-benar disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat umumnya dan masyarakat Pasemah khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1984, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Indonesia, Cendana Press, Jakarta.
- Abdurrahman, 1978, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung.
- EPHN, 1931, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Adat, Jakarta.
- Ojojodiguno, 1959, Asas-asas Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, 1979, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung.
- Sanikusuma, Hilman, 1983, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung.
- Saragih, Djaren, 1982, Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko, 1983, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1978, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
- Yudho, Winarno dan Agus Brotosusilo, 1986, Sistem Hukum Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Undang-Undang NO 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah NO 9 tahun 1975, Pradnya Paramita, Jakarta.

Pagar Alam, 12 Nopember 1991.-

K e p a d a

Nomor : 070/2013 /PA/1991.-  
Sifat : B i a s a.-  
Rajad : B i a s a.-  
Lamp.- :  
Pokok : lain mengadakan Penelitian.-

Yth.Sdr. Pemuka Adat dalam Wilayah  
Kecamatan Pagar Alam, -

di -

P A G A R A L A M.-

Sehubungan dengan surat Universitas Terbuka Bengkulu tanggal -  
2 Nopember 1991 nomor : 518/PT45.8.08/N/1991, tentang izin Penelitian -

N a m a / : Samsoel, SH  
N i p : 131787231.-  
Bermaksud : Akan mengadakan penelitian dalam  
Wilayah Kecamatan Pagar Alam .-  
J u d u l : KELESTARIAN SISTEM PERKAJINAN ADAT  
PASEMAH SETELAH BERTILAKUNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.-

Bersama ini dipermaklumkan pada saudara-saudara bahwa Staf -  
pengajar Universitas Terbuka Bengkulu akan mengadakan penelitian pada  
pemuka Adat dalam Kecamatan Pagar Alam.-

Berkenaan dengan hal tersebut diulnta pada saudara untuk dapat  
membantu segala sesuatunya yang diperlukan dalam penelitian tersebut.-

Demikian untuk maklum atas perhatian saudara diucapkan terima  
kasih.-

AN. CAMAT PAGAR ALAM,  
Sekwilcam,

MASRI MUHAMAD.BA/-

PEMUDA TK.I.NIP.440007055.-

REVISI : disampaikan kepada :

- 1.Yth. Bapak Bupati/Kdh Tk.II. Lahat.-
- 2.Yth. Pembantu Bupati Wil. II Pagar Alam.-
3. \_\_\_\_\_ A r s i p \_\_\_\_\_



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

50

# UNIVERSITAS TERBUKA

UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH BENGKULU

Alamat Jalan Raya Kandang Liman Bengkulu Telp. 21170. 22331

---

Kepada

Yth : Bapak/Ibu \_\_\_\_\_

04 NOV 1991

di

Pagar Alam.

Dengan hormat,

Dalam rangka pelestarian dan pembinaan adat istiadat daerah Pasemah, dengan ini saya;

**N a m a** : Hasmonel, SH

**Tpt/Tgl Lahir** : Pagar Alam, 11 Juli 1961

**Pekerjaan** : Dosen FISIP Universitas Terbuka  
dpt di UPBJJ Bengkulu

**Alamat** : Jln Bandar Raya No 30 Rawa Makmur  
Bengkulu, 38371.

akan melaksanakan kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan Perkawinan Adat Pasemah di Kecamatan Pagar Alam.

Saya percaya, bapak/ibu yang terpilih untuk mengisi/ menjawab pertanyaan terlampir adalah orang yang benar-benar mengetahui tentang seluk beluk Perkawinan Adat Pasemah secara mendalam, untuk itu dengan rendah hati mohon agar bapak/ibu tidak berkeberatan meluangkan sedikit waktu.

Demikian atas kesediaan dan kemurahan hati bapak/ibu saya aturkan terime kasih.

Hormat saya,

Hasmonel, SH

DAFTAR PERTANYAAN

Nomor:

## I. IDENTITAS:

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
3. Umur : \_\_\_\_\_ tahun
4. Jabatan/Status : Kepala/Pegawai KUA, P3H, Lurah/Kepala Desa, Martan  
(Pilih salah satu) : Pasirah, Pemuka Adat atau Orang tua yang pernah menikahkan anak/keluarga lainnya.

Berilah tanda V pada salah satu kolom yang sesuai dengan apa yang bapak/ibu ketahui dan selanjutnya isilah pada tempat yang sudah disediakan.

## III. TENTANG ASAS-ASAS/PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN

Ya/ ada	tidak ada	tidak tahu

1. Apakah adat Pasemah mengenal/mempunyai asas-asas prinsip-prinsip dasar ?

Bila ada, sebutkan prinsip-prinsip dasar yang bapak/ibu ketahui.

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

2. Apakah menurut adat Pasemah prinsip-prinsip tersebut harus dipatuhi ?

alasannya: ....

.....

.....

--	--	--

3. Apakah prinsip-prinsip dasar tersebut masih dipatuhi sampai sekarang ?

alasannya: ....

.....

.....

--	--	--

4. Apakah prinsip-prinsip dasar tersebut mengalami perubahan ?

Bila jawabannya Ya, kenapa sampai berubah ?

.....

.....

.....

--	--	--



Ya/ ada	tidak ada	tidak tahu

5. Apakah prinsip-prinsip dasar tersebut pernah menjadi penghambat terjadinya suatu perkawinan, bila perkawinan itu mengikuti Undang-undang perkawinan yang sekarang berlaku?

Bila jawabannya Ya, mohon berikan penjelasan

.....  
 .....  
 .....

### III. TENTANG BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

6. Apakah adat Pasemah mengenal/mempunyai bentuk-bentuk perkawinan, misalnya bentuk perkawinan nemendean, belaki atau ambik anak?

mohon sebutkan bila masih ada yang lain.

a. ....  
 b. ....

7. Apakah bentuk-bentuk perkawinan tersebut masih diakui keberadaannya?

8. Apakah bentuk-bentuk perkawinan tersebut masih digunakan sampai sekarang?

9. Bentuk perkawinan manakah yang paling sering digunakan?

Kemapa bentuk perkawinan ini sering digunakan

.....  
 .....  
 .....  
 (bila perlu, bisa dituliskan pd halaman sebelah)

10. Bila ada bentuk perkawinan yang paling sering dipakai berarti ada bentuk perkawinan yang jarang dipakai. Bentuk perkawinan apakah itu?

.....

Kemapa bentuk perkawinan ini jarang digunakan

.....  
 .....  
 .....

### IV. TENTANG TATA CARA BERELAK PERKAWINAN

11. Apakah adat Pasemah mengenal/mempunyai tata cara sebelum melaksanakan perkawinan?

Bila ada mohon sebutkan urut-urutannya.  
 (bisa menggunakan halaman sebelah)

12. Apakah menurut adat Pasemah, tata cara tersebut harus dipatuhi ?

alasananya .....

.....

Ya/ ada	tidak ada	tidak tahu

13. Apakah tata cara adat tersebut masih digunakan sampai sekarang ?

Bila tidak mohon sebutkan alasananya:

a. ....

b. ....

c. ....

--	--	--

14. Apakah masalah bentuk perkawinan dibicarakan dalam tata cara sebelum perkawinan ini ?

15. Apakah calon mempelai ikut berperan dalam memilih sarikan tata cara sebelum perkawinan ini ?


#### V. TENTANG TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

16. Apakah adat Pasemah mengenal/memiliki tata cara dalam melangsungkan perkawinan ?

Bila ada, mohon sebutkan urut-urutannya dan bisa dijelaskan pada halaman sebelah.

a. ....

b. ....

c. ....

d. ....

--	--	--

17. Apakah tata cara tersebut masih diakui keberadaannya ?

18. Apakah tata cara tersebut masih digunakan sampai sekarang ?

Bila tidak mohon jelaskan alasananya pada halaman sebelah.


19. Menurut Adat Pasemah-bukun apakah yang dijadikan dasar syah tidaknya suatu perkawinan ?

.....

20. Apakah sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, adat Pasemah juga mengharuskan setiap perkawinan dicatat ?

Bila ya, dimana suatu perkawinan itu harus dicatatkan.

.....


## PERSONALIA TENAGA PENELITIAN

### 1. Pembimbing Penelitian:

- a. Nama : Merry Yono, SH
- b. N I P : 131412540
- c. Pangkat dan Jabatan : Penata Tk I/IIId/Lektor Madya
- d. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum UNIR
- e. Tugas/Hubungan kerja : Konsultan
- f. Waktu yang disediakan  
untuk penelitian ini : 1 jam/minggu selama 3 bulan

### 2. Kepala Proyek (Merangkap Tenaga Penelitian)

- a. Nama : Hasmonel, SH
- b. N I P : 131787231
- c. Pangkat dan Jabatan : Penata Muda/IIIs/Asisten Ahli
- d. Alamat kerja : UPBJJ-UT Bengkulu
- e. Tugas/Hubungan kerja : Peneliti
- f. Tempat Penelitian : Kecamatan Pagar Alam (Lihat)
- g. Waktu yang disediakan  
untuk penelitian ini : 6 jam/minggu selama 4 bulan

### 3. Pekerja Lapangan/Enumerator/Interviewer

- a. Nama : Drs. Awanuddin
- N I P : 131627611
- Pangkat/golongan : Penata Muda Tk I, III/b
- Pekerjaan : Guru SMA I Pagar Alam
- b. Nama : Yupiterni
- N I P : 131576671
- Pangkat/golongan : Pengantar Tk I, II/d
- Pekerjaan : Guru SMA 2 Pagar Alam